

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN No. 2337-5299

Volume 4 / Nomor 2 / Tahun 2016 / Hal. 126 - 244

**Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW
Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi**
Agus Subagyo

**Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional
Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka**
Ilham Gemiharto

**Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**
Mahyuni

**Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung**
Novie Indrawati Sagita

**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia.**
Samugyo Ibnu Redjo

Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi
Suryanto



9 772337 529004

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 4 /No. 1/Tahun 2016 / Hal. 126

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi	126 – 140
Oleh: Agus Subagyo	
Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka	141 – 163
Oleh: Ilham Gemiharto	
Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017	164 – 177
Oleh: Mahyuni	
Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung	178 – 198
Oleh: Novie Indrawati Sagita	
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia	199 – 210
Oleh: Samugyo Ibnu Redjo	
Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi	211 – 226
Oleh: Suryanto	

SINKRONISASI RTRW PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA BARAT DAN RTRW PERTAHANAN DARAT KODAM III/SILIWANGI

Agus Subagyo¹
subagyoeti@yahoo.com.

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pentingnya sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam proses penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur / studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat perbedaan persepsi antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam menyusun RTRW Pembangunan yang berbasis *prosperity approach* dan RTRW Pertahanan Darat yang berbasis *security approach*; (2) Perlunya formulasi kebijakan Amdal Pertahanan sebagai katalisator dalam sinkronisasi RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat; (3) Perlunya kesiapan instrumental, struktural, dan kultural dalam melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Penataan Ruang, Pendekatan Keamanan, dan Pendekatan Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil membentang dari Sabang sampai dengan Merauke dengan gugusan ribuan kepulauan yang terdiri dari sepertiga wilayah perairan sehingga memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik dan geostrategi (Syakir, 2011:63). Kondisi geografis Indonesia terletak diantara dua benua (yakni benua Asia dan Australia) dan dua samudera (yakni samudera Hindia dan samudera pasifik) yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga menjadi banyak incaran oleh berbagai negara asing dengan kepentingan yang kompleks dan beragam, yang tentunya memerlukan upaya dari semua pihak untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

¹ Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani dan menjabat sebagai Dekan FISIP Unjani.

Proses penataan ruang menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia agar supaya proses pembangunan nasional berjalan secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dengan memprioritaskan aspek kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dan aspek pertahanan keamanan (*security approach*). (Mabesad, 2010:8). Hal ini sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menekankan proses penyelenggaraan pembangunan nasional yang memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan perbatasan sebagai fokus pembangunan agar supaya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dapat diatasi. Selaras dengan hal tersebut, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proses penataan ruang dan pemanfaatan ruang difokuskan pada pembangunan nasional yang memperhatikan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan, secara sinergis, bertahap, berlanjut dan berkelanjutan.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, kebijakan penataan ruang lebih dititikberatkan pada daerah propinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Puspitohadi, 2014:25). Penyiapan, perencanaan, penyusunan, dan pemanfaatan tata ruang wilayah menjadi otonomi bagi pemerintah daerah pada tingkat propinsi, kabupaten, dan kota, seiring dengan kebijakan pembangunan daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga sangat penting untuk memberikan perhatian serius terhadap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pembangunan Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota. RTRW pembangunan Pemda merupakan dokumen perencanaan strategis bagi suatu daerah untuk menata, mengatur dan memanfaatkan ruang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Hal ini patut disoroti mengingat kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa penyusunan dan implementasi RTRW pembangunan Pemda seringkali tidak selaras dengan RTRW pertahanan yang disusun oleh TNI (Hadi, 2009:32). RTRW pembangunan Pemda lebih menekankan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, sementara RTRW pertahanan lebih menitikberatkan pada kepentingan pertahanan keamanan, sehingga dalam tataran implementasi dilapangan mengalami hambatan, kurang sesuai, kurang sinkron dan kurang sinergis. Aspek pertahanan

keamanan kurang terwadahi dan kurang terkomodasi dalam dokumen RTRW pembangunan Pemda sehingga menimbulkan benturan pada level teknis operasional di lapangan dengan RTRW pertahanan. Padahal, dalam tataran normatif yuridis, perencanaan tata ruang wilayah ditujukan untuk memelihara keamanan, meningkatkan daya tangkal wilayah, dan menciptakan ketahanan wilayah yang stabil dan dinamis guna mendukung integrasi nasional dalam rangka keutuhan NKRI.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menyoroti tentang sinkronisasi RTRW pembangunan yang disusun oleh Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW pertahanan darat yang disusun oleh Kodam III/Siliwangi. Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan (eksplanasi) mengenai pentingnya sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses penyusunan RTRW pembangunan pemda propinsi Jawa Barat dengan RTRW pertahanan darat Kodam III/Siliwangi. Signifikansi penelitian ini adalah sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak terkait, khususnya Pemda Propinsi Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi, dalam menyusun kebijakan penyiapan, penyusunan, perencanaan, dan implementasi RTRW pembangunan dan RTRW pertahanan darat.

Penelitian ini sebenarnya terinspirasi oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh dua peneliti yang membahas tentang RTRW pembangunan Pemda yang berbasis pada prosperity approach dan RTRW pertahanan Kodam III/Siliwangi yang berbasis pada security approach, sebagai berikut :

Pertama, penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Herwan Sudira, Proses Penyusunan RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat, Tesis, MIP FISIP Unjani, Cimahi, Tahun 2014. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun penataan ruang yang ramah lingkungan, berbasis pada pembangunan berkelanjutan, mengutamakan pembangunan manusia, dan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). RTRW pembangunan Pemda Jawa Barat secara normatif sudah bagus karena memberikan perhatian pada pembangunan wilayah Jawa Barat bagian selatan, namun dalam prakteknya, sampai dengan saat ini, wilayah selatan Jawa Barat masih relatif tertinggal pembangunannya dengan wilayah utara Jawa Barat. Terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi, sarana prasarana, infrastruktur, dan

pembangunan manusia di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Padahal, wilayah selatan Jawa Barat sangat strategis dari aspek pertahanan dan sangat potensial dari aspek sumber daya alam, pariwisata, pertanian dan perkebunan, sehingga layak untuk mendapatkan prioritas pembangunan.

Kedua, penelitian dalam bentuk laporan akhir karya tulis militer (karlismil) yang dilakukan oleh Mayor Iwan Susetiawan, Analisis Penyusunan RTRW Pertahanan Darat di Kodam III/ Siliwangi, TASKAP, Bandung, Seskoad, Tahun 2013. Inti penelitian ini menyatakan bahwa proses penyusunan RTRW Pertahanan menitikberatkan pada dimensi *security approach* (pendekatan keamanan dan pertahanan), dimana wilayah Jawa Barat merupakan wilayah strategis dalam konteks sistem pertahanan semesta, karena sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta dan berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Cristmast dan Kepulauan Cocos, Australia, sehingga sangat rawan terhadap adanya infiltrasi, penetrasi, dan intervensi asing sebagai ancaman nyata. Wilayah Jawa Barat Selatan harus mendapatkan prioritas untuk dibangun berbagai basis kekuatan militer untuk mengantisipasi adanya serangan musuh yang datangnya dari selatan, khususnya Australia. Diperlukan desain penyusunan RTRW Pertahanan yang komprehensif dengan membangun klasifikasi : daerah depan, daerah komunikasi, daerah belakang, serta pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Berdasarkan dua hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian menekankan pada paradigma sendiri-sendiri, dimana RTRW pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat menekankan pada *prosperity approach* dan RTRW Pertahanan Kodam III/Siliwangi menekankan pada *security approach*. Padahal, kedua paradigma / pendekatan tersebut harus sejalan, dimana pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan pertahanan dan stabilitas keamanan (*security approach*). Demikian pula sebaliknya, pembangunan pertahanan dan keamanan (*security approach*) tidak akan berhasil dengan optimal tanpa adanya dukungan dari pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*).

Berangkat dari dua hasil penelitian sebelumnya tersebut, penulis melakukan penelitian ini untuk mensinkronkan antara RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Tulisan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara komponen pemerintah dan TNI dalam melakukan proses penyusunan RTRW sehingga akan terjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan bagi elemen pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan elemen TNI, khususnya TNI AD, terutamanya satuan komando kewilayahan (satkowil, Kodam), agar terwujud sinergitas dalam penyusunan RTRW Pembangunan Pemda dan RTRW Pertahanan darat Kodam.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknis eksplanasi yang bersifat dekriptif (Sugiono, 2013:39). Sedangkan teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan studi literature / studi pustaka / studi dokumentasi.

Observasi dilakukan di dua institusi, yakni di Pemda Propinsi Jawa Barat, khususnya Bappeda Propinsi Jawa Barat, dan Kodam III/Siliwangi, yang semuanya berada di wilayah Kota Bandung, Ibu Kota Propinsi Jawa Barat.

Wawancara dilakukan secara mendalam / *indepth interview* terhadap narasumber dan informan yang kompeten dan terlibat langsung dalam penyusunan RTRW Pemda dengan RTRW Pertahanan Darat.

Adapun studi literatur dikumpulkan dari berbagai dokumen aturan perundang-undangan, dokumen RTRW Pemda, dokumen RTRW Pertahanan, dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan berbagai literatur terkait lainnya.

PEMBAHASAN

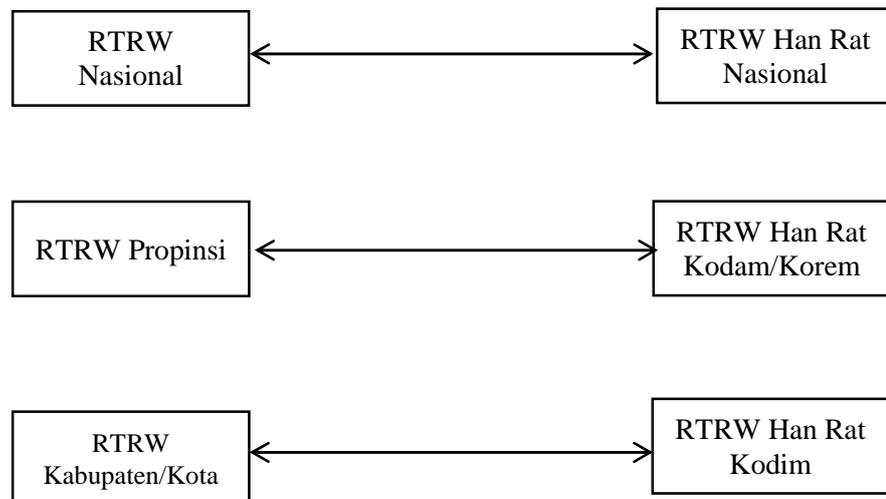
RTRW Nasional dan RTRW Pertahanan Darat Nasional

Dokumen RTRW Nasional disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan semua kementerian, lembaga dan badan negara / pemerintahan serta *stakeholders* atau pihak terkait lainnya, yang menjadi panduan, pedoman dan koridor

bagi pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun RTRW di daerahnya masing-masing (Subagyo, 2012:47). RTRW Pertahanan Nasional disusun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, yang merupakan sumber rujukan dan petunjuk bagi semua matra TNI (TNI AD, AL, dan AU) dalam menyusun RTRW Pertahanan Darat Nasional, RTRW Pertahanan Laut Nasional, dan RTRW Pertahanan Udara Nasional.

Dalam konteks RTRW Pertahanan Darat Nasional, semua komando kewilayahan TNI AD, baik Kodam, Korem, dan Kodim, menyusun RTRW Pertahanan Darat, yang mengacu pada RTRW Pertahanan Darat Nasional, mengadaptasi perkembangan lingkungan strategis (lokal, nasional, regional, global), dan selaras dengan instansi samping (pemda propinsi, kabupaten, kota). Kedudukan RTRW Nasional dengan RTRW Pertahanan Darat Nasional dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar Kedudukan RTRW Nasional dan RTRW Han Rat Nasional



Berkaitan dengan RTRW di tingkat daerah, Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota menyusun RTRW Pembangunan Daerah, yang tentunya harus selaras, serasi dan seimbang dengan RTRW Pertahanan Darat yang disusun oleh Kodam, Korem, dan Kodim (Subagyo, 2013:61). Untuk memahami lebih mendalam tentang RTRW Pembangunan Pemda dengan RTRW Pertahanan Darat, dapat dideskripsikan dalam tabel berikut ini :

Tabel RTRW Pembangunan Pemda dan RTRW Pertahanan Darat

NO	UNSUR	RTRW PEMBANGUNAN PEMDA	RTRW PERTAHANAN DARAT
1	Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> ⌋ RTRW Propinsi ⌋ RTRW Kabupaten ⌋ RTRW Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ⌋ RTRW Han Kodam ⌋ RTRW Han Korem ⌋ RTRW Han Kodim
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ⌋ UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ⌋ PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ⌋ UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ⌋ UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI ⌋ PP No. 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
3	Bentuk Hukum	Perda (Peraturan Daerah) Disusun Pemda dan DPRD	Keputusan Pimpinan Satkowil Dalam Dokumen Satkowil
4	Leading Sectors	Bappeda Propinsi, Kabupaten, Kota	Pengembangan Fungsi Teritorial di Kodam, Korem, Kodim (Aster, Kasiter, Pasiter)
5	Instansi	Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten / Kota)	TNI AD (Kodam, Korem, Kodim)

Persepsi Pemda Propinsi Jawa Barat Dan Kodam III/Siliwangi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapatkan data yang menunjukkan bahwa terdapat mis persepsi antara aparat birokrasi pemerintahan di Propinsi Jawa Barat dengan jajaran Kodam III/Siliwangi dalam memahami, memandang dan menyusun RTRW Pembangunan Pemda dengan RTRW Pertahanan Darat. Proses penyusunan RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat terlalu menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya upaya mengakomodasi kepentingan pertahanan keamanan dalam proses penataan tata ruang wilayah di Propinsi Jawa Barat. Hal yang sama juga terjadi pada jajaran Kodam III/Siliwangi yang menyusun RTRW Pertahanan Darat terlalu menekankan kepentingan pertahanan keamanan, sehingga kurang menghiraukan aspek kesejahteraan masyarakat, yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini :

**TABEL PERSEPSI PEMDA PROPINSI JAWA BARAT
DAN KODAM III/SILIWANGI**

NO	PERSEPSI PEMDA PROPINSI JABAR	PERSEPSI KODAM III/SILIWANGI
1	Pemda Propinsi Jawa Barat memandang RTRW pertahanan hanya mementingkan <i>security approach</i> saja (seperti : aspek pertahanan semata, tanpa melihat aspek ekonomi, pembangunan & kesejahteraan).	Kodam III/Siliwangi memandang RTRW Pemda hanya mementingkan <i>prosperity approach</i> saja (seperti : aspek pembangunan ekonomi, mengejar PAD, pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek pertahanan keamanan).
2	Pemda Propinsi Jawa Barat menilai RTRW pertahanan kurang ilmiah, kurang kongkret, dan kurang realistis untuk diterapkan.	Kodam III/Siliwangi menilai RTRW Pemda banyak dikerjakan konsultan / kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak paham situasi dan kondisi pertahanan keamanan wilayah.
3	Pemda Propinsi Jawa Barat menganggap RTRW Pertahanan cocok diterapkan ketika dalam keadaan darurat perang, sedangkan Indonesia potensi perang relative kecil.	Kodam III/Siliwangi menganggap RTRW Pemda pro pasar, terlalu mewedahi kepentingan komunitas bisnis, sehingga kadangkala dilanggar demi investasi, PAD, dll

Contoh Riel Sinkronisasi : “Amdal Pertahanan”

Untuk menghindari benturan kepentingan antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam menyusun RTRW Pembangunan Pemda dengan RTRW Pertahanan Darat, maka diperlukan langkah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk mensinkronkan penataan ruang di wilayah Propinsi Jawa Barat yang mampu mengakomodasi dan mewedahi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan (Subagyo, 2015:8). Salah satu “jembatan” untuk mewujudkan sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi adalah dengan membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan. Amdal pertahanan harus dapat diterapkan oleh Pemda Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi semua pengusaha, pelaku usaha, masyarakat, maupun semua komponen bangsa yang ingin memanfaatkan ruang di wilayah Propinsi Jawa Barat.

Sebagai contoh, pembangunan gedung pemerintahan di Propinsi Jawa Barat, baik gedung DRPRD, gedung Pemda, gedung milik pemerintahan daerah lainnya, harus memenuhi Amdal Pertahanan, yakni gedung-gedung pemerintahan tersebut harus dibangun dengan memperhatikan aspek dan kepentingan pertahanan, dengan menyediakan fasilitas Helly Pad, bunker, dan ruang bawah tanah yang anti bom. Hal ini dirancang untuk mengantisipasi apabila suatu saat terjadi keadaan darurat perang, misalnya Indonesia berperang dengan negara lain, maka dapat dipakai untuk kepentingan pertahanan, penyelamatan pejabat pemerintahan daerah, evakuasi pejabat VIP, dan untuk tempat persembunyian yang aman bagi masyarakat. Selain itu, kantor pemerintahan daerah harus dirancang terowongan bawah tanah yang menghubungkan dengan markas TNI, Polri, maupun kantor pemerintahan daerah yang strategis lainnya, sehingga memungkinkan mekanisme koordinasi antar sipil dan militer ketika negara dalam keadaan darurat perang (Subagyo, 2015:3).

Demikian pula dengan pembangunan jalan tol yang ada di wilayah Propinsi Jawa Barat misalnya, dimana harus ada Amdal Pertahanan. Jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah maupun swasta dan konsorsium jalan tol harus memenuhi Amdal Pertahanan. Artinya, jalan tol yang dibangun harus mampu dirancang untuk pendaratan pesawat tempur, *landing* dan *take off* pesawat tempur, maupun mampu dipergunakan untuk manuver / mobilitas kendaraan tempur berat, seperti tank, meriam, panser, dan kendaraan tempur berat lainnya, apabila kondisi dan situasi dalam keadaan darurat perang dengan negara lain. Hal ini sangat penting karena dalam keadaan darurat perang, sangat mungkin semua bandara lumpuh akibat dibombardir oleh negara lain ketika perang terjadi, sehingga jalan tol menjadi alternatif *landing* dan *take off* secara darurat.

Model Sinkronisasi : Jawa Barat Bagian Selatan

Dalam perspektif pertahanan negara, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa posisi Jawa barat bagian Selatan sangat strategis dalam konteks perang dengan Australia. Wilayah Selatan Jawa Barat berdekatan dengan Kepulauan Cristmas dan Kepulauan Cocos Australia, tepatnya berhadap-hadapan dengan wilayah selatan Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, sehingga sangat rawan

terjadinya aksi infiltrasi, penetrasi dan penyusupan oleh pihak asing, khususnya Australia, untuk kepentingan intelijen. Selama ini, wilayah ini telah dijadikan sebagai jalur lalu lintas imigran yang berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan, untuk menuju Australia. Jawa Barat bagian selatan dijadikan sebagai wilayah “transit” bagi sindikat / mafia kejahatan penyelundupan manusia / kegiatan kejahatan smugling, yang merupakan kejahatan transnasional.

Dalam penyusunan RTRW Pertahanan Darat yang disusun oleh Kodam III/Siliwangi telah menempatkan Wilayah Jawa Barat bagian selatan sebagai daerah depan untuk mengantisipasi apabila terjadi perang dengan Australia. Jika diskenariokan terjadi perang dengan Australia, maka Australia akan melakukan serangan, salah satunya, melalui Kepulauan Christmas dan Kepulauan Cocos, yang berdekatan dengan wilayah Jawa Barat, untuk masuk melakukan serangan udara, laut dan darat, melalui wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Skenario serangan udara yang dilakukan oleh Australia untuk menyerang Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut : Sasaran wilayah Jakarta sebagai ibu kota, maka pasti akan melalui wilayah Jawa Barat Bagian Selatan. Perlu RTRW Pertahanan yang mampu menangkal serangan udara Australia dari wilayah udara Jawa Barat bagian Selatan.

Skenario serangan laut yang dilakukan oleh Australia untuk menyerang Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut : Kapal Perang Australia akan melalui perairan Jawa Barat bagian Selatan untuk mendarat atau menyerang dengan tembakan persenjataan canggih dan rudal. Perlu RTRW Pertahanan yang mampu menahan dan menangkal mendaratnya / mendekatnya pasukan Australia di wilayah pantai Jawa Barat bagian Selatan.

Skenario serangan darat yang dilakukan oleh Australia untuk menyerang Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut : Pasukan Australia menyusup masuk ke daratan Jawa Barat bagian Selatan untuk menyerang, menduduki dan menguasai wilayah Jawa Barat dan masuk Jakarta. Perlu RTRW Pertahanan yang mampu memposisikan Jawa Barat dalam daerah depan, daerah komunikasi, dan daerah belakang dalam operasi melawan serangan Australia dari Jabar Selatan.

Kesiapan Sinkronisasi : Instrumental, Struktural, & Kultural

Dalam melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi, diperlukan berbagai langkah persiapan yang integral dan komprehensif, baik pada tataran komunikasi, koordinasi maupun kolaborasi. Pemda Propinsi Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi merupakan elemen strategis untuk saling sinergis secara harmonis dalam mengantisipasi penataan ruang wilayah Jawa Barat yang mampu mewadahi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan.

Posisi strategis wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah selatan Jawa Barat, yang berdekatan secara geografis dengan wilayah Australia (Kepulauan Christmas dan Cocos) harus mendapatkan perhatian lebih, khususnya penataan ruang yang tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Penataan ruang wilayah Jawa Barat bagian selatan untuk kepentingan kesejahteraan memang sangat mendesak dilakukan mengingat kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur fisik di Jawa Barat bagian selatan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Jawa Barat bagian utara. Ketimpangan wilayah, kondisi kemiskinan masyarakat dan sarana prasarana / fasilitas umum di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang memprihatinkan memang mendorong Pemda Propinsi Jawa Barat untuk menekankan aspek kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan RTRW Pembangunan.

Namun demikian, RTRW pembangunan yang disusun oleh Pemda Propinsi Jawa Barat harus dibarengi dengan perhatian dan prioritas pada kepentingan pertahanan keamanan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, yang sangat strategis dan potensial dari aspek sistem pertahanan negara, sehingga diperlukan kesadaran bersama antar berbagai pihak untuk menyelaraskan dengan RTRW Pertahanan Darat yang disusun oleh Kodam III/Siliwangi. Berikut ini akan diuraikan kesiapan yang harus dilakukan untuk melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi :

Pertama, kesiapan instrumental. Artinya, diperlukan payung hukum berupa MoU sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan darat antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi. MoU ini kemudian harus dijabarkan pada tingkatan yang lebih rendah, yakni antara Kabupaten / Kota dengan

Korem / Kodim, sehingga akan dapat operasional di lapangan. MoU antara Pemda Propinsi, Kabupaten / Kota dengan Kodam, Korem, dan Kodim sangat mendesak dilakukan sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat yang harmonis dan sinergis dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan.

Kedua, kesiapan struktural. Artinya, diperlukan forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi dalam penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan darat, yang mampu menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara semua pihak terkait sehingga kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan mampu terwadahi dan terakomodasi dalam RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Forum ini merupakan wadah untuk saling diskusi, tukar informasi, tukar data, dan tukar pengalaman antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi. Forum ini nantinya harus dibentuk pada tingkat dibawahnya, yakni pada tingkat Kabupaten / Kota, yang melengkapi forum yang telah ada sebelumnya, seperti Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Ketiga, kesiapan kultural. Artinya, diperlukan perubahan *mind set* dan *culture set* dari semua elemen bangsa bahwa urusan pertahanan tidak hanya menjadi domain TNI semata, melainkan merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa, termasuk Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Aparat teritorial Kodam III/Siliwangi harus memahami RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat. Demikian pula sebaliknya, aparat birokrasi Pemda Propinsi Jawa barat harus memahami RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi, sehingga tercipta RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat yang berbasis pada keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dengan pendekatan pertahanan keamanan (*security approach*).

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat ditarik benang merah kesimpulan sebagai berikut :

Proses penyusunan RTRW Pembangunan Pemda Jawa Barat lebih menitikberatkan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat, perkembangan otonomi daerah, dan pelayanan publik. Sedangkan penyusunan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi lebih menitikberatkan pada kepentingan pertahanan keamanan (*security approach*), sebagai bentuk jawaban terhadap kemungkinan ancaman yang potensial muncul dari negara asing.

Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan menempati posisi strategis untuk dilakukan penataan ruang yang dirancang berbasis pada keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan kepentingan pertahanan keamanan, mengingat secara geografis, wilayah ini berdekatan dengan Kepulauan Christmas dan Kepulauan Cocos, Australia, sehingga harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pemda Propinsi Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi dalam menyusun RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat.

Sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi dapat dilakukan melalui – salah satunya – penerapan kebijakan Amdal Pertahanan, dimana semua proses pemanfaatan ruang di wilayah Jawa Barat, khususnya Jawa Barat Bagian Selatan, sudah selayaknya harus mendapatkan rekomendasi Amdal Pertahanan yang dikeluarkan oleh Kodam III/Siliwangi, sehingga akan mampu mewadahi dan mengakomodasi kepentingan pertahanan keamanan dalam pembangunan daerah di wilayah Jawa Barat.

Kesiapan sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi dapat dilakukan melalui tiga aras, yakni kesiapan aras instrumental, aras struktural, dan aras kultural, sehingga akan mampu menciptakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemda Propinsi Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi dalam pembangunan daerah yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pendekatan pertahanan keamanan.

Berlandaskan gambaran kesimpulan tersebut, dapat ditarik formulasi rekomendasi sebagai berikut :

Kepada Pemda dan DPRD Propinsi Jawa Barat, agar supaya membuat Perda Sinkronisasi RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat, yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemda Propinsi Jawa Barat dan Kodam

III/Siliwangi untuk melakukan sinergi dan harmonisasi dalam proses penyiapan, penyusunan, perencanaan, dan penerapan RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat secara seimbang, serasi, selaras, dan berkesinambungan.

Kepada Pemda Propinsi Jawa Barat, agar supaya melakukan sosialisasi RTRW Pembangunan kepada semua elemen TNI, khususnya TNI AD, terutama jajaran Kodam III/Siliwangi, termasuk Korem, Kodim, dan Koramil di wilayah Propinsi Jawa Barat, sehingga elemen Kodam III/Siliwangi mengetahui, memahami, dan menjiwai ruh dan esensi dari RTRW Pembangunan yang disusun oleh Pemda Propinsi Jawa Barat, sehingga tercipta sinergi, penyamaan persepsi, dan kesatuan pandangan antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi.

Kepada Kodam III/Siliwangi, agar supaya melibatkan semua elemen masyarakat, komunitas pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan RTRW Pertahanan Darat untuk mendapatkan masukan / saran / pertimbangan eksternal, serta melakukan sosialisasi kepada semua komponen bangsa tentang esensi dan manfaat RTRW Pertahanan Darat Kodam Siliwangi guna mendukung pembangunan daerah di wilayah propinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Lukito. 2009. *Penyusunan RTRW Pertahanan Darat : Masalah dan Solusi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mabes TNI AD. 2010. *Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*, Jakarta : Mabesad.
- Puspitohadi, Wibisono. 2014. *Integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota Bandung Dalam Rangka Ketahanan Wilayah*, Tesis. Yogyakarta : UGM.
- Subagyo, Agus. 2012. Integrasi dan Harmonisasi RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, *Jurnal Jipolis*. FISIP Unjani Bandung. Vol. II, No. 4.
- . 2013. Persepsi Pemda dan TNI AD Tentang Penataan Ruang Wilayah, *Jurnal Pertahanan*, Unhan Bogor. Vol. II, No. 2.
- . 2015. 18 Mei. Pendekatan Keamanan dan Pendekatan Kesejahteraan Dalam Penataan Ruang, *harian Pikiran Rakyat*.
- . 2015. 12 November. “Sinkronisasi RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan”, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Daerah dengan tema *Peran Serta Pemda Dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Di Daerah*, yang diselenggarakan oleh Korda Kemhan Wilayah Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Pemda Propinsi Jawa Barat.
- Sudira, Herwan. 2014. *Proses Penyusunan RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat*, Tesis. Cimahi : MIP FISIP Unjani.

- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Susetiawan, Iwan. 2013. *Analisis Penyusunan RTRW Pertahanan Darat di Kodam III/Siliwangi*, TASKAP. Bandung : Seskoad.
- Syakir, Irna Irmania. 2011. *Manajemen Ruang Wilayah Indonesia*, Jakarta : Penerbit Alfabeta.